

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693122/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (28) MALUKU UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (693122) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
- Sebesar : Rp. 969.770.000 (SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	969.770.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN T E R N A T E (062) Rp. 969.770.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

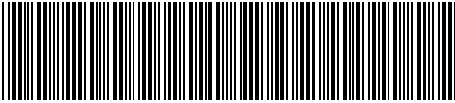
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693122/2026

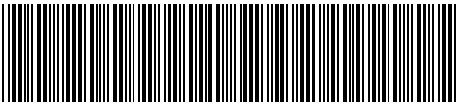


DS:0750-7746-7113-5850

Satker : (693122) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	23.916.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	23.916.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	945.854.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	945.854.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693122/2026
I A. INFORMASI KINERJA



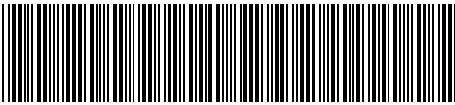
DS:0750-7746-7113-5850

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693122) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				23.916.000	
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah				23.916.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan	23.916.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		1.00	Rekomendasi Kebijakan	23.916.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				945.854.000	
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				945.854.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		8,00	Lembaga	25.671.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		8.00	Lembaga	25.671.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		300,00	Orang	54.430.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		300.00	Orang	54.430.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		13,00	Lembaga	17.332.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		13.00	Lembaga	17.332.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	10.196.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	Data	10.196.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693122/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0750-7746-7113-5850

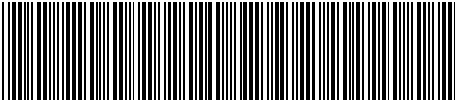
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693122) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		133,00	Orang	665.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	133.00	Orang	665.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		26,00	Kelompok Masyarakat	103.610.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	26.00	Kelompok Masyarakat	103.610.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	69.615.000
Rincian Output		:	01	QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PN)	1.00	Lembaga	69.615.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693122/2026
I B. SUMBER DANA



DS:0750-7746-7113-5850

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693122) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	969.770.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	969.770.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

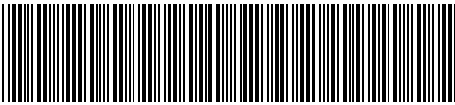
No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DS:0750-7746-7113-5850

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693122) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693122/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



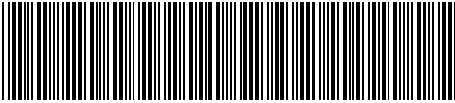
DS:0750-7746-7113-5850

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693122) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	54.430	-	-	-	54.430	062	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	17.332	-	-	-	17.332	28 . 51	
01 RM		-	17.332	-	-	-	17.332	062	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	10.196	-	-	-	10.196	28 . 51	
01 RM		-	10.196	-	-	-	10.196	062	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	665.000	-	-	-	665.000	28 . 51	
01 RM		-	665.000	-	-	-	665.000	062	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	103.610	-	-	-	103.610	28 . 51	
01 RM		-	103.610	-	-	-	103.610	062	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693122/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0750-7746-7113-5850

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693122) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

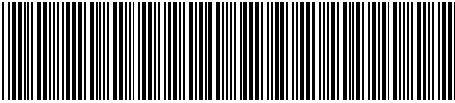
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	69.615	-	-	-	69.615	28 . 51	
	01 RM	-	69.615	-	-	-	69.615	062	
JUMLAH		-	969.770	-	-	-	969.770		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693122/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0750-7746-7113-5850

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693122) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

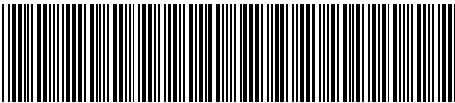
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693122	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	9.706	25.730	66.720	6.037	99.848	184.122	63.223	95.567	3.764	26.198	77.008	311.847	969.770
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	9.706	25.730	66.720	6.037	99.848	184.122	63.223	95.567	3.764	26.198	77.008	311.847	969.770
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	0	0	0	14.305	0	3.711	461	5.439	0	0	23.916
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	14.305	0	3.711	461	5.439	0	0	23.916
		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	9.706	25.730	66.720	6.037	99.848	169.817	63.223	91.856	3.303	20.759	77.008	311.847	945.854
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	9.706	25.730	66.720	6.037	99.848	169.817	63.223	91.856	3.303	20.759	77.008	311.847	945.854

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693122/2026
IV A. B L O K I R



DS:0750-7746-7113-5850

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [693122] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

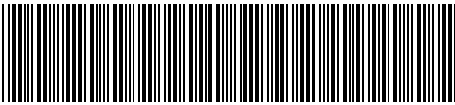
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693122/2026
IV B. C A T A T A N



DS:0750-7746-7113-5850

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [693122] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001